



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA KEKERINGAN

Efendi

Analisis Kebijakan Ahli Muda
efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan bahwa bulan April hingga Juni 2023 sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2023. Kemarau tahun ini diperkirakan akan lebih kering dibandingkan tiga tahun lalu. Curah hujan pada bulan Agustus sampai Oktober 2023 diperkirakan berada pada katagori di bawah normal. Kondisi seperti ini juga disebabkan karena semakin menguatnya El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) yang terjadi secara bersamaan sehingga menyebabkan wilayah Indonesia menjadi lebih kering dan curah hujan rendah. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu laut di atas kondisi normal, sedangkan IOD merupakan perbedaan suhu permukaan laut antara dua wilayah, yaitu di Laut Arab (Samudra Hindia bagian barat) dan Samudra Hindia bagian timur di selatan Indonesia. Kombinasi kedua fenomena ini menyebabkan periode musim kemarau yang lebih parah. Akibat penguatan El Nino dan IOD menyebabkan daerah-daerah di Indonesia akan terkena dampak kekeringan. Selain kekeringan, kondisi ini juga akan berpotensi terjadinya kebakaran hutan seperti yang sering terjadi Sumatera dan Kalimantan. Tidak hanya itu, kemarau juga mengakibatkan kebakaran lahan pertanian dan berpengaruh pada kesehatan masyarakat.

BMKG memperkirakan, daerah-daerah yang diprediksi mendapatkan potensi curah hujan bulanan dengan kategori rendah (akumulasi kurang dari 100 mm/bulan) berpeluang besar terjadi di beberapa daerah, sebagai berikut: pada bulan Maret terjadi di bagian tengah Sulawesi Tengah; April, sebagian NTB; sebagian NTT, dan bagian tengah Sulawesi Tengah; Bulan Mei terjadi di bagian selatan Sumatera Selatan, pesisir utara Banten, DKI Jakarta, pesisir utara Jawa Barat, bagian timur Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, sebagian Bali, sebagian NTB, dan sebagian NTT; bulan Juni terjadi di sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Jambi, sebagian Sumatera Selatan, sebagian Lampung, sebagian Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi Selatan, dan sebagian Papua bagian selatan; dan di Bulan Juli-Agustus terjadi di sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Jambi, sebagian Sumatera Selatan, sebagian Lampung, sebagian Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Gorontalo, sebagian Sulawesi Utara dan sebagian Papua.

Dalam menanggulangi bencana kekeringan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian terkait di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), TNI dan Polri, pemerintah daerah (Pemda), serta lembaga lainnya, melakukan kegiatan koordinasi. Sebagai hasil koordinasi tersebut, Kementerian PUPR melakukan inventarisasi sarana prasarana yang sudah ada untuk pengelolaan air di seluruh Indonesia terutama daerah yang paling terkena dampak kekeringan, antara lain dengan memastikan pemanfaatan volume air di bendungan dan mengatur volume air di bendungan semaksimal mungkin. Langkah tersebut dilakukan dengan mengoperasikan pintu-pintu bendungan jika suatu daerah masih terjadi hujan, pembukaan pintu bendungan untuk bisa mengurangi banjir, dan menutup pintu air jika daerah tersebut memasuki musim kemarau.

Selain bendungan, Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan seluruh sumur eksisting yang ada, yang jumlahnya sekitar 3.230 titik di 20 provinsi; serta merehabilitasi sumur-sumur eksisting sebanyak 25 titik di 12 provinsi. Koordinasi antar instansi Pemerintah juga dilakukan dalam menyiapkan skenario untuk pengeboran sumur-sumur baru di daerah yang kering air. BNPB juga melakukan kegiatan langsung, yakni dengan menyalurkan air bersih di wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan dan bersama-sama dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten hingga kota) mengajak dan menguatkan masyarakat desa untuk bisa mengatasi masalah kekeringan. Lebih lanjut, BNPB juga melakukan upaya untuk memetakan kebutuhan terkait sumber daya manusia (SDM), dana dan peralatan dalam rangka penanganan bencana kekeringan.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR yang bertanggung jawab atas masalah bencana perlu memberikan perhatian serius terhadap kasus kekeringan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan dampak kekeringan dengan cara:

1. Mendukung kerja sama dan solidaritas seluruh *stakeholders* dalam penanganan masalah kekeringan
2. Mendukung pemerintah dalam upaya mengantisipasi terjadinya kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di daerah yang memiliki potensi kekeringan paling parah imbas fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole;
3. Mengawasi pemerintah dalam hal pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat wilayah yang terdampak kekeringan; dan
4. Mendorong pemerintah untuk lebih berperan dalam mengedukasi masyarakat, misalnya terkait edukasi konservasi air, pengelolaan sumber daya air yang bijaksana serta pengembangan sumber air alternatif.

Sumber

Kompas, 14 dan 17 Juni 2023;
Media Indonesia, 13 s.d.18 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.